



JOURNAL OF GOVERNANCE AND SOCIAL ISSUES

FISIP – Universitas Lampung

Volume : Volume 5 No 1 Tahun 2025

E-ISSN : 2829-1263

P- ISSN : 2830-0270

OPEN  ACCESS

Hubungan antara Lingkungan Organisasi dan Administrasi dalam Penggunaan Sistem Informasi Manajemen: Studi Etnografi pada Instansi Pemerintah

Kholifatul Munawaroh¹

Septiany Dwi Amanda²

¹Dosen, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

²Mahasiswa, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Keywords:

ABSTRACT

Management Information System; Organizational Ecology; Public Administration Digitalization.

This study aims to analyze the implementation of Management Information Systems (MIS) in the Bandar Lampung City Trade Office by highlighting the adaptive interaction between the organizational environment and public administration practices. Using an ethnographic-based qualitative approach, this study explores how employees adapt to digital policies, how communication and coordination patterns are formed, and how the dynamics of bureaucratic work change in the context of information technology implementation.

The results show that MIS can improve administrative efficiency, accelerate reporting, and strengthen the transparency and accountability of public services. The transformation from manual to digital processes creates a data-driven work culture and improves cross-departmental coordination. However, a number of challenges remain, such as infrastructure limitations, digital competency gaps, and the need for ongoing training. In addition, leadership has proven to play a crucial role through supervision, motivation, and support for employees during the adaptation process. Theoretically, this research enriches the study of organizational ecology in the context of public sector digitalization. Practically, these findings emphasize the importance of strengthening human resource capacity and transformational leadership for the sustainability of MIS implementation



Kata Kunci :

Sistem Informasi
Manajemen,
Ekologi Organisasi,
Digitalisasi
Administrasi
Publik

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan menyoroti interaksi adaptif antara lingkungan organisasi dan praktik administrasi publik. Melalui pendekatan kualitatif berbasis etnografi, penelitian ini menelusuri bagaimana pegawai beradaptasi dengan kebijakan digital, bagaimana pola komunikasi dan koordinasi terbentuk, serta bagaimana dinamika kerja birokrasi berubah dalam konteks implementasi teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelaporan, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik. Transformasi dari proses manual menuju digital menciptakan budaya kerja berbasis data dan meningkatkan koordinasi lintas bagian. Namun, sejumlah tantangan masih muncul, seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kompetensi digital, serta kebutuhan pelatihan berkelanjutan. Selain itu, kepemimpinan terbukti memainkan peran krusial melalui supervisi, motivasi, dan dukungan terhadap pegawai selama proses adaptasi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ekologi organisasi dalam konteks digitalisasi sektor publik. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas SDM dan kepemimpinan transformasional bagi keberlanjutan implementasi SIM.

I. Pendahuluan

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memainkan peran sentral dalam aktivitas perdagangan regional. Fungsi kota sebagai pusat distribusi barang, kawasan pasar grosir-ritel, dan ruang interaksi pelaku ekonomi menjadikan Dinas Perdagangan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas harga, mengelola pasar, mengawasi perizinan usaha, serta membina pelaku UMKM. Kompleksitas tugas tersebut menuntut ketersediaan data yang akurat, koordinasi antarunit yang terintegrasi, serta respons kebijakan yang cepat dan tepat. Perkembangan program pelayanan publik yang telah dijalankan menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap sistem informasi yang mampu mendukung tata kelola perdagangan secara efektif (Vivaldy, 2023).

Transformasi digital pada sektor publik memperkuat urgensi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas layanan. Platform seperti sIKaM menjadi contoh nyata bagaimana digitalisasi mendukung pendataan IKM dan promosi produk lokal, sekaligus mempercepat proses administratif di lingkungan dinas (Vivaldy, 2023). Namun, efektivitas SIM tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologis semata. Dalam kerangka ekologi organisasi, birokrasi dipandang sebagai sistem adaptif yang keberlanjutannya ditentukan oleh kemampuannya merespons tekanan lingkungan eksternal seperti regulasi digital, perubahan preferensi konsumen, dan dinamika pasar serta kesiapan internal berupa struktur organisasi, budaya kerja, dan kapasitas sumber daya manusia.





Perspektif ini relevan untuk menelaah implementasi SIM karena menempatkan sistem informasi sebagai bagian dari mekanisme adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan. Secara administratif, penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) mampu meningkatkan efisiensi kerja internal, seperti mengurangi duplikasi data, mempercepat pelaporan, dan mempermudah pemantauan program. Selain itu, SIM memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data. Namun, tantangan implementasi masih muncul dalam bentuk keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, interoperabilitas antar-platform, dan kesesuaian birokrasi dengan sistem digital, sehingga diperlukan desain SIM yang kontekstual dan strategi perubahan organisasi yang adaptif (Rangkuti & Nasution, 2025).

Penelitian terbaru (2020–2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIM di sektor publik sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara faktor eksternal dan internal organisasi. Rahmadani (2021) menegaskan pentingnya kesiapan digital pegawai, sementara Sukmono (2022) menyoroti peran budaya birokrasi yang mendukung inovasi. Putri dan Siregar (2024) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki kontribusi signifikan dalam mengarahkan perubahan berbasis teknologi. Meskipun demikian, kajian yang mengintegrasikan perspektif ekologi organisasi secara komprehensif dalam analisis implementasi SIM di pemerintah daerah, khususnya pada dinas yang berhadapan dengan dinamika perdagangan yang cepat, masih terbatas. Keterbatasan inilah yang menjadi *research gap* dan pijakan penting penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana lingkungan eksternal serta struktur administrasi internal memengaruhi implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga menelaah berbagai hambatan yang muncul dalam pemanfaatan SIM serta strategi adaptasi organisasi yang dikembangkan untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, penelitian ini mempertanyakan sejauh mana kepemimpinan dan pelatihan berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlanjutan implementasi SIM dalam konteks birokrasi publik.

II. Tinjauan Pustaka

Teori Ekologi Organisasi dalam Administrasi Publik

Teori ekologi pada awalnya berkembang dalam ilmu biologi untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya (Pamudji, 1993; Ukasah, 1987). Riggs (1980) kemudian memperluas konsep ini ke ranah administrasi negara melalui perspektif *ecology of public administration*, yang menekankan bahwa birokrasi merupakan “organisme sosial” yang berinteraksi secara dinamis dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, struktur birokrasi, perilaku pegawai, serta kebijakan publik dipandang sebagai hasil adaptasi terhadap tekanan lingkungan eksternal seperti perubahan regulasi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat (Utami et al., 2021).





Relevansi teori ini dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terletak pada gagasan bahwa digitalisasi bukan hanya intervensi teknis, melainkan bentuk adaptasi organisasi terhadap dinamika lingkungan seperti perkembangan teknologi informasi, tuntutan transparansi, dan kompleksitas pelayanan publik. Dengan demikian, teori ekologi menyediakan landasan konseptual untuk memahami bagaimana dinas pemerintah merespons perubahan digital dan menyesuaikan proses administratifnya.

Administrasi Publik dan Birokrasi dalam Era Digital

Pemikiran klasik dari Wilson (1887), Weber (1947), dan Waldo (1955) memberikan fondasi penting dalam memahami birokrasi publik. Wilson menekankan pemisahan politik-administrasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan (Septiani & Mulya, 2023). Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi paling rasional melalui hierarki, aturan formal, dan rekrutmen berbasis kompetensi (Mustanir et al., 2022). Dengan cara ini, Weber menekankan bahwa administrasi publik harus dijalankan secara rasional dan objektif agar mampu membantu pencapaian tujuan negara. Dwight Waldo (1955) menambahkan bahwa administrasi sarat nilai dan tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi teknis.

Dalam era transformasi digital, konsep birokrasi mengalami perluasan melalui pendekatan *digital-era governance*, yang menekankan integrasi teknologi, keterbukaan data, dan kolaborasi lintas unit. Teori manajemen perubahan (Kotter, 2012; Fernandez & Rainey, 2020) menegaskan bahwa keberhasilan adopsi teknologi dalam birokrasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, kesiapan organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia.

Sistem Informasi Manajemen dalam Sektor Publik

Sistem informasi manajemen (SIM) didefinisikan sebagai rangkaian komponen manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan data yang bekerja secara terpadu untuk menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan (Yakub, 2012; Hartono, 2013). Dalam sektor publik, SIM mendukung transparansi, efisiensi administrasi, dan integrasi data antarunit organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif sejalan dengan teori ekologi organisasi yang memungkinkan instansi merespons dinamika lingkungan seperti perubahan pasar, regulasi perdagangan, dan tuntutan layanan publik berbasis data.

Penelitian Terdahulu

Kajian empiris mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) menunjukkan bahwa keberhasilannya dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis dan non-teknis. Sejumlah penelitian menegaskan pentingnya kesiapan organisasi dan kompetensi sumber daya manusia, sebagaimana disampaikan oleh Rahmadani (2021) dan Sukmono (2022) yang menemukan bahwa kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem digital merupakan prasyarat utama keberhasilan penerapan SIM. Selain itu, aspek budaya birokrasi juga memiliki pengaruh signifikan; Putri dan Siregar (2024) mengidentifikasi bahwa resistensi terhadap perubahan kerap muncul ketika upaya digitalisasi tidak diiringi dengan pelatihan maupun komunikasi perubahan yang memadai.

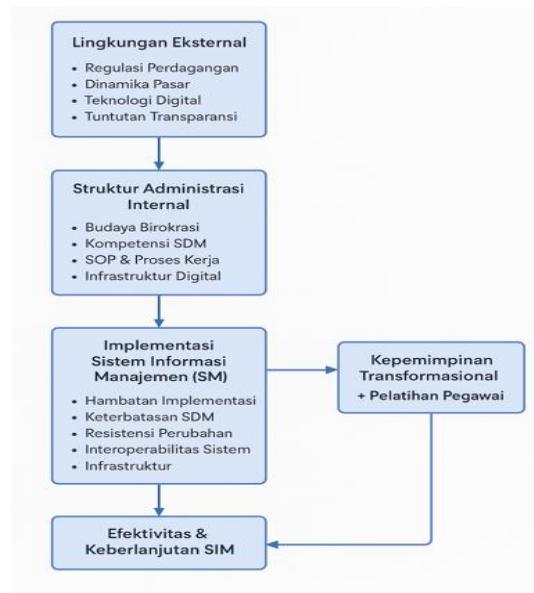




Dari sisi kepemimpinan, penelitian Han dan Perry (2023) serta Noor dan Salim (2024) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mampu mendorong komitmen pegawai dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Literatur mengenai transformasi digital sektor publik juga menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam pengelolaan SIM, mencakup integrasi teknologi, penguatan kapasitas SDM, tata kelola data, dan penyesuaian struktur organisasi (OECD, 2021; Wirtz et al., 2022; Al-Khoury, 2023). Meskipun berbagai studi tersebut memberikan kontribusi penting, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif ekologi organisasi untuk memahami interaksi antara lingkungan eksternal dan struktur administrasi internal dalam konteks implementasi SIM di dinas pemerintah daerah, khususnya sektor perdagangan, masih sangat terbatas. Kondisi inilah yang menjadi *research gap* dan landasan utama penelitian ini.

Menurut Perda Kota Bandar Lampung No. 60 Tahun 2016, (2021), Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan lembaga teknis yang berperan sebagai unsur pendukung Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Tugas utama dinas ini adalah mengimplementasikan kewenangan daerah yang mencakup tiga fokus utama, yaitu perdagangan, pengelolaan pasar, dan layanan metrology. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 menunjukkan bahwa, dinas perdagangan memiliki fungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja, mengelola administrasi internal, serta menjalankan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh Walikota sesuai dengan bidang kerjanya (Lampung Dinas Perdagangan Kota Bandar, 2024). Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung telah menerapkan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pengelolaan data pasar tradisional, pendataan pedagang, monitoring harga kebutuhan pokok, dan layanan perizinan usaha perdagangan. Sistem ini membantu meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat arus informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual



Bagan 1. Kerangka Konseptual





Melalui kerangka tersebut dapat dilihat bagaimana setiap variabel berinteraksi membentuk alur sebab-akibat yang berpengaruh pada efektivitas dan keberlanjutan SIM. Kerangka konseptual ini menggambarkan bahwa lingkungan eksternal meliputi regulasi perdagangan, dinamika pasar, perkembangan teknologi digital, dan tuntutan transparansi memberi tekanan sekaligus arah perubahan bagi struktur administrasi internal, yang mencakup budaya birokrasi, kompetensi SDM, SOP dan proses kerja, serta infrastruktur digital. Kondisi internal tersebut kemudian menentukan kualitas implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM), yang sering dihadapkan pada hambatan implementasi, keterbatasan SDM, resistensi perubahan, isu interoperabilitas, dan kesiapan infrastruktur. Selanjutnya, efektivitas implementasi SIM dipengaruhi secara langsung oleh kepemimpinan transformasional dan program pelatihan pegawai, yang berperan memperkuat kesiapan dan adaptasi organisasi terhadap digitalisasi. Pada akhirnya, interaksi antara implementasi SIM dan dukungan kepemimpinan transformasional menghasilkan efektivitas dan keberlanjutan SIM, yang menjadi outcome utama dari keseluruhan proses dalam model analisis ini.

III. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif untuk memahami secara mendalam dinamika penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial dan administratif yang terjadi secara natural di lapangan, terutama terkait interaksi antara struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dalam konteks ekologi organisasi. Untuk memperkuat kedalaman analisis, penelitian ini juga memanfaatkan unsur-unsur etnografi, khususnya melalui keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas organisasi, observasi partisipatif, serta pencatatan proses adaptasi pegawai terhadap penggunaan sistem digital.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung selama periode September hingga Oktober 2025, bertepatan dengan masa aktif implementasi dan optimalisasi sistem informasi di instansi tersebut. Lokasi ini dipilih karena peran strategisnya dalam pengelolaan data perdagangan dan pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di tingkat provinsi. Penentuan waktu dan tempat penelitian juga mempertimbangkan situasi aktual bahwa pada periode tersebut Dinas Perdagangan tengah gencar melaksanakan program digitalisasi pelayanan publik dan promosi produk lokal, termasuk integrasi dengan platform sIKaM (Sistem Informasi IKM) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Kondisi ini menjadikan instansi tersebut sebagai lokasi yang ideal untuk mengamati secara langsung proses adaptasi, dinamika implementasi, serta tantangan penggunaan SIM dalam lingkungan birokrasi daerah.





Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas operasional dinas, khususnya pada bidang yang berkaitan dengan pengelolaan data, layanan publik, dan pembinaan pelaku usaha. Selain observasi, dilakukan pula wawancara mendalam dengan pegawai dari berbagai bidang dan tingkatan jabatan, termasuk pejabat struktural, staf pelaksana, dan operator sistem. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatannya dalam penggunaan SIM dan sIKaM.

Teknik pengambilan data mencakup observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, serta pencatatan harian lapangan guna menangkap pola interaksi, hambatan implementasi, dan bentuk dukungan yang diberikan oleh pimpinan organisasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tahapan analisis data kualitatif Miles & Huberman, yaitu (1) reduksi data, untuk menyaring dan mengelompokkan informasi sesuai tema; (2) penyajian data (data display) melalui matriks, kutipan, dan kategori tematik; serta (3) verifikasi dan penarikan kesimpulan untuk memastikan temuan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta pemeriksaan ulang temuan kepada beberapa informan kunci (member checking). Untuk memperjelas struktur informan, penelitian melampirkan tabel daftar informan yang memuat jabatan, bidang kerja, peran terhadap SIM, dan relevansi kontribusinya terhadap penelitian.

IV. Hasil dan Diskusi

Pembahasan penelitian ini disusun dalam empat tema analitis untuk menafsirkan dinamika implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, yaitu: (1) adaptasi organisasi terhadap digitalisasi, (2) peran kepemimpinan dalam implementasi SIM, (3) hambatan sumber daya manusia dan budaya organisasi, serta (4) strategi peningkatan kapasitas dan keberlanjutan digitalisasi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap hubungan antara temuan lapangan dan kerangka teori yang digunakan.

1. Adaptasi Organisasi terhadap Digitalisasi

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan telah memanfaatkan sejumlah aplikasi digital seperti Siaga Bapok, OSS, presensi elektronik, dan sistem kepegawaian daring. Pemanfaatan beragam sistem ini merupakan bentuk respons organisasi terhadap perubahan lingkungan administratif dan teknologi. Salah satu informan menyatakan bahwa *"sekarang hampir semua proses diarahkan ke aplikasi, jadi kami harus mengikuti sistem baru"* (Informan Bapak Edwar, 2025). Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori ekologi organisasi Riggs (1980) yang memandang organisasi sebagai organisme yang harus beradaptasi terhadap tekanan lingkungan agar tetap relevan. Pandemi COVID-19 dan kebijakan digitalisasi pelayanan publik menjadi faktor eksternal yang mendorong organisasi mempercepat transformasi digital. Implementasi OSS sebagai sarana perizinan daring dan penggunaan Siaga Bapok untuk pemantauan harga real-time menunjukkan bahwa organisasi telah bergerak menuju pola kerja yang lebih responsif dan berbasis data.





Adaptasi ini tidak hanya mencerminkan kemampuan organisasi menyerap perubahan, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana birokrasi lokal berevolusi dalam lanskap administrasi yang semakin kompleks.

2. Peran Kepemimpinan dalam Implementasi SIM

Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam mendorong keberhasilan implementasi SIM. Beberapa pegawai menegaskan bahwa arahan dan keteladanan pimpinan sangat memengaruhi penerimaan terhadap sistem digital. Informan kedua menyampaikan bahwa "*kalau pimpinan memberikan contoh dan menegaskan aturan, kami jadi lebih cepat mengikuti aplikasi baru*" (Informan Ibu Zuraida, 2025). Analisis ini sejalan dengan kerangka birokrasi rasional-legal Weber (1947) yang menekankan pentingnya struktur kerja yang teratur, hierarkis, dan berbasis aturan.

Dalam Siaga Bapok, misalnya, alur kerja mulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga evaluasi oleh pimpinan menunjukkan adanya kepastian prosedural. Namun efektivitas prosedur tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan mengelola perubahan, memberikan instruksi yang jelas, dan memastikan konsistensi pelaksanaan. Kepemimpinan transformasional juga tampak melalui pemberian motivasi, dukungan moral, dan penguatan komitmen pegawai, yang kesemuanya berperan dalam mempercepat proses adopsi teknologi.

3. Hambatan SDM dan Budaya Organisasi

Meskipun implementasi SIM berkembang positif, penelitian menemukan adanya hambatan yang berkaitan dengan kapasitas pegawai dan budaya organisasi. Tantangan seperti keterlambatan input data, kurangnya literasi digital, dan ketergantungan pada metode manual masih sering terjadi. Informan ketiga mengungkapkan bahwa "*ada yang masih terbiasa manual, jadi agak sulit kalau langsung pindah ke digital*" (Informan Bapak Kohar, 2025). Analisis hambatan ini mengonfirmasi pandangan Dwight Waldo (1955) bahwa administrasi publik bukan hanya proses teknis, tetapi merupakan aktivitas manusiawi yang dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan, dan persepsi pegawai. Resistensi terhadap sistem digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga ketidaksiapan budaya kerja dalam menghadapi perubahan. Perspektif Agus Mulyanto yang menyatakan bahwa SIM terdiri dari unsur teknologi, proses, dan manusia juga relevan untuk menjelaskan fenomena ini; unsur manusia menjadi faktor paling krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi SIM. Dengan demikian, hambatan yang ditemukan bukanlah kegagalan desain sistem, tetapi lebih terkait kesiapan internal organisasi, terutama kemampuan pegawai beradaptasi dengan struktur kerja baru yang lebih terstandar dan berbasis teknologi.





4. Strategi Peningkatan Kapasitas dan Keberlanjutan Digitalisasi

Untuk memastikan keberlanjutan implementasi SIM, penguatan kapasitas pegawai menjadi kebutuhan utama. Informan keempat menekankan pentingnya pelatihan dengan mengatakan "*pelatihan itu penting, apalagi untuk pegawai yang belum terbiasa dengan sistem digital*" (Informan Bapak Roni, 2025). Pelatihan dibutuhkan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk mengurangi resistensi dan membangun rasa percaya diri dalam menggunakan aplikasi. Temuan penelitian menunjukkan empat strategi utama yang perlu diterapkan, yaitu: (1) pelatihan dan pendampingan berkala untuk meningkatkan literasi digital, (2) evaluasi periodik atas kinerja dan relevansi sistem, (3) penguatan komunikasi internal untuk memperlancar koordinasi antarunit, dan (4) manajemen perubahan yang terencana untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih adaptif. Strategi ini sejalan dengan prinsip sistem informasi publik menurut Davis & Coleman bahwa SIM harus mampu menyediakan informasi akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks Dinas Perdagangan, keberlanjutan digitalisasi sangat bergantung pada sinergi antara teknologi dan kapasitas organisasi. Tanpa penguatan SDM dan koordinasi internal yang efektif, manfaat SIM tidak dapat mencapai potensi maksimalnya.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, implementasi SIM di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan proses transformasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, dukungan kepemimpinan, kapasitas SDM, dan kesiapan budaya organisasi. Digitalisasi telah mendorong organisasi menuju pola kerja yang lebih efisien dan berbasis data, namun keberhasilan jangka panjangnya memerlukan komitmen terhadap peningkatan kapasitas pegawai dan manajemen perubahan yang terstruktur. Penerapan SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan arah transformasi digital nasional, yang menempatkan teknologi sebagai elemen kunci dalam reformasi birokrasi.

V. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan efisiensi kerja, terutama pada proses pendataan, pelaporan, dan pelayanan publik. Namun implementasi tersebut masih menghadapi hambatan pada sisi kompetensi teknologi informasi pegawai, kualitas infrastruktur jaringan, serta variasi kemampuan adaptasi digital. Temuan ini mendukung relevansi teori ekologi organisasi, di mana birokrasi lokal terbukti beradaptasi terhadap tekanan lingkungan mulai dari tuntutan digitalisasi hingga kebutuhan pelayanan yang lebih cepat dan akuntabel.





Adaptasi yang muncul, seperti kerja sama lintas bidang, komunikasi informal, dan inisiatif individu, memperlihatkan bagaimana organisasi menata ulang perilaku internalnya untuk mencapai stabilitas baru dalam ekosistem digital.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh interaksi antara kepemimpinan, budaya organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini mengonfirmasi argumen klasik bahwa teknologi tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan struktur organisasi dan perilaku pegawai yang adaptif. Sementara itu, kontribusi praktis penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberlanjutan implementasi SIM menuntut kebijakan internal yang lebih kuat, mencakup pelatihan digital berkelanjutan, pembaruan sistem secara teratur, evaluasi kinerja berbasis data, serta integrasi informasi antarbidang untuk memperkuat akurasi dan kecepatan aliran informasi. Sebagai implikasi kebijakan,

Dinas Perdagangan dan pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi peningkatan kapasitas pegawai melalui program literasi digital yang terstruktur, mendorong kepemimpinan yang partisipatif dan visioner dalam proses digitalisasi, serta memperkuat infrastruktur teknologi untuk mengurangi hambatan operasional. Selain itu, diperlukan kebijakan integrasi SIM lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih terpadu. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital di sektor publik dapat dicapai melalui sinergi antara kesiapan teknologi, kompetensi SDM, dan kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan secara berkelanjutan.

VI. Daftar Pustaka

- Alhadi, I. B. (2022). Sistem Informasi Manajemen (Sim) Sebagai Sarana Pencapaian E-Government. *Jurnal Stie Semarang*, 14(2), 184–195.
- Ibrahim, W. H., & Maita, I. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 17–22.
- Lampung Dinas Perdagangan Kota Bandar. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. *Disperdag.Bandar Lampung*.
- Mustanir, A., Muhammad Rais Rahmat Razak, Koisin, E., Erfina, Mochamad Rizki Fitrianto, Lestari, A., Rizkia, N. D., Aries Samudra Wicaksono, S., M., Prastyo, I. Y., Syamsuadi, A., Waliah, S., Pakpahan, R. R., Kusnadi, I. H., Rahman, M., Mouw, E., & Baihaqi, M. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*.
- Perda Kota Bandar Lampung No. 60 Tahun 2016. (2021). *Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung* (Vol. 2019).





- Rangkuti, Z. S., & Nasution, M. I. P. (2025). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efisiensi Operasional Di Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1), 180–184.
- Septiani, S., & Mulya, H. (2023). *Ilmu administrasi negara* (Issue October).
- Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). IKLIM ORGANISASI KELURAHAN DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1147–1152.
- Vivaldy, A. (2023). *Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.

